Pembinaan Narapidana dengan Pendekatan Deprivasi dan Importansi di Lapas Kelas I Madiun

Abdilah Dwi Putra¹, Iman Santoso²

Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: abdilah.dwiputra@gmail.com

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 15 September 2025

ABSTRACT

Modern correctional systems demand a more humane approach that emphasizes the social reintegration of prisoners. This study aims to analyze the implementation of inmate development at Class I Madiun Prison through deprivation and importation approaches. The research employed a descriptive qualitative method using interviews, participatory observation, and document studies. The findings reveal that inmate development is conducted through personality reinforcement, religious activities, education, and vocational training aligned with social needs. The deprivation approach functions to maintain discipline and order, while the importation approach explores inmates' potential and facilitates their reintegration. The study also identifies challenges such as limited facilities, human resources, and bureaucracy that hinder program effectiveness. The integration of both approaches proves effective in reducing recidivism and enhancing inmates' readiness to return to society. This study implies the urgency of correctional policies that are more adaptive, collaborative, and based on individual risk assessments.

Keywords: Inmate Development, Deprivation, Importation, Social Reintegration

ABSTRAK

Pemasyarakatan modern menuntut pendekatan yang lebih manusiawi dengan menekankan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun melalui pendekatan deprivasi dan importasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana dilaksanakan melalui penguatan kepribadian, kegiatan keagamaan, pendidikan, serta pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan sosial. Pendekatan deprivasi berfungsi untuk menjaga disiplin dan ketertiban, sementara pendekatan importasi berperan dalam menggali potensi dan memfasilitasi reintegrasi narapidana. Temuan ini juga mengidentifikasi tantangan berupa keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan birokrasi yang memperlambat efektivitas program. Integrasi kedua pendekatan terbukti mampu menekan angka residivisme dan memperkuat kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya kebijakan pemasyarakatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko individual.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana, Deprivasi, Importasi, Reintegrasi Sosial

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang cukup signifikan dari sekadar penindakan ke arah pembinaan dan rehabilitasi. PP No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan pembinaan sebagai rangkaian aktivitas untuk meningkatkan ketakwaan, pengetahuan, sikap, profesionalisme, dan kesehatan narapidana. Pergeseran ini menandakan bahwa pemidanaan tidak lagi sekadar dilihat sebagai instrumen penghukuman, melainkan sebagai sarana transformasi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Foucault (1995) bahwa sistem peradilan modern harus menekankan disiplin dan rehabilitasi, bukan hanya hukuman fisik. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menekankan perlindungan hak asasi, kesetaraan, proporsionalitas, dan tujuan reintegrasi sosial.

Realitas lapangan menunjukkan bahwa narapidana berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2022) memperlihatkan bahwa warga binaan berasal dari berbagai profesi, seperti wiraswasta, buruh harian, sopir, maupun petani. Keberagaman ini membawa dinamika unik yang memengaruhi proses adaptasi di dalam penjara. Menurut penelitian Zhao, Messner, dan Liu (2020), faktor importasi berupa nilai dan pengalaman hidup dari luar sangat menentukan bagaimana narapidana beradaptasi dengan lingkungan penjara. Sebaliknya, keterbatasan fisik, kehilangan otonomi, dan pengawasan ketat justru memperkuat model deprivasi yang menekan kondisi psikologis narapidana.

Fenomena sosial yang muncul di penjara, seperti depresi, bunuh diri, hingga perilaku kekerasan, menegaskan urgensi pembinaan yang lebih manusiawi. Studi Karnovinanda et al. (2014) menemukan bahwa sekitar 75% narapidana mengalami gejala depresi, sedangkan Mulia (2020) mencatat tingginya angka kematian akibat bunuh diri di lembaga pemasyarakatan. Situasi ini sejalan dengan temuan internasional bahwa tekanan psikologis akibat deprivasi seringkali memicu gangguan mental serius (Mazher & Arai, 2025). Oleh karena itu, pendekatan rehabilitatif berbasis psikososial mutlak diperlukan untuk mencegah degradasi kesehatan mental di kalangan narapidana.

Di sisi lain, teori importasi yang diperkenalkan Irwin dan Cressey (1962) menunjukkan bahwa narapidana membawa nilai, perilaku, dan identitas sosial mereka ke dalam penjara. Hal ini berarti strategi pembinaan tidak bisa dilepaskan dari latar belakang individu. Penelitian global menegaskan pentingnya mengintegrasikan pendekatan berbasis latar belakang sosial dan budaya narapidana agar program rehabilitasi lebih kontekstual (Zhao et al., 2020). Dengan demikian, program pembinaan yang hanya menekankan disiplin internal (deprivasi) tanpa memperhatikan potensi positif dari pengalaman narapidana sebelumnya akan kehilangan efektivitas.

Dalam praktiknya, Lapas Kelas I Madiun menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai lembaga pengamanan dan pusat pembinaan. Program pembinaan yang dijalankan meliputi kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, pendidikan formal, serta kegiatan kerja produktif. Strategi ini sesuai dengan model

pemasyarakatan modern yang menekankan reintegrasi sosial melalui pengembangan kepribadian dan kemandirian. Sebagaimana diuraikan oleh Ward dan Maruna (2007), reintegrasi narapidana ke masyarakat hanya dapat efektif apabila program pembinaan didesain adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko individu.

Berdasarkan uraian di atas, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memahami bagaimana teori deprivasi dan importasi diterapkan secara simultan dalam pembinaan narapidana. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan dinamika adaptasi narapidana terhadap kondisi terbatas di penjara, tetapi juga bagaimana pengalaman, latar belakang, dan potensi mereka dapat dimanfaatkan untuk mendukung reintegrasi sosial. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun melalui pendekatan deprivasi dan importasi serta menilai sejauh mana kedua model tersebut mampu mendukung keberhasilan reintegrasi sosial dan mengurangi risiko residivisme.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlandaskan paradigma post-positivisme dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pembinaan narapidana melalui pendekatan deprivasi dan importasi di Lapas Kelas I Madiun. Data dikumpulkan dengan teknik triangulasi yang mencakup wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif terhadap aktivitas pembinaan, serta telaah dokumentasi kebijakan dan arsip resmi lembaga. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, sementara validitas temuan dijaga melalui teknik pengecekan silang antar sumber dan refleksi kritis terhadap konteks penelitian. Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika pembinaan narapidana dengan mengintegrasikan teori deprivasi dan importasi dalam praktik pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data dan hasil temuan penelitian ini secara spesifik berfokus pada pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun, dengan penekanan pada pendekatan deprivasi dan importasi. Dasar dari pengamatan tersebut merupakan berasal dari teori diturunkan ke dimensi yang telah dipilih oleh peneliti yaitu *Assessment of Equity*, *Self Assessment*, *Prisonization*, dan Kebudayaan dalam Lapas. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun diimplementasikan, khususnya dengan mempertimbangkan perspektif deprivasi dan importasi.

Assessment of Equity

Berdasarkan observasi di Lapas Kelas I Madiun, dimensi *Assessment of Equity* dalam pembinaan narapidana menunjukkan implementasi yang baik. Lapas telah

memastikan kesetaraan akses bagi seluruh narapidana terhadap program-program pembinaan. Lapas Madiun berupaya memberikan keterampilan praktis kepada narapidana. Dalam observasi, terlihat bahwa Lapas telah menyiapkan segala kebutuhan untuk program ini. Ini mencakup penyediaan instruktur yang kompeten di bidang membatik maupun pertanian, serta material dan peralatan yang dibutuhkan, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian untuk pembinaan bertani.

Gambar 1 Kegiatan Bertani Narapidana

Gambar di atas secara langsung menunjukkan keberadaan fasilitas dan kegiatan bertani di dalam Lapas. Ini mengindikasikan bahwa Lapas telah menyediakan lahan, bibit, dan mungkin juga alat-alat pertanian yang diperlukan untuk program ini. Keberadaan program ini secara fisik berarti narapidana memiliki kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Keberadaan petugas Lapas dalam foto di lokasi pertanian menunjukkan adanya pengawasan dan dukungan dari pihak Lapas terhadap program ini.

Ini mencerminkan kesiapan Lapas dalam menyediakan instruktur atau pendamping yang membimbing narapidana dalam proses bertani, menegaskan komitmen Lapas dalam memastikan sumber daya yang mumpuni untuk pelaksanaan program pembinaan yang berprinsip kesetaraan. Selain kegiatan yang dapat diikuti oleh seluruh narapidana tanpa membedakan yaitu melalui Program pelatihan membatik. Kegiatan bertani menjadi salah satu bentuk kegiatan dari program pembinaan sesuai dengan *passion* atau keahlian narapidana. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Kegiatan Kerja terungkap bahwa Lapas Kelas I Madiun menerapkan sistem asesmen individual untuk memastikan distribusi hak dan kesempatan program pembinaan yang adil.

Pemanggilan narapidana satu per satu untuk mengidentifikasi minat, bakat, dan keahlian yang mereka miliki. Melalui proses ini, narapidana kemudian disalurkan ke program pelatihan atau kegiatan kerja yang sesuai dengan potensi

mereka, bukan berdasarkan status atau koneksi. Strategi ini bertujuan agar pembinaan menjadi lebih efektif dan relevan, sehingga narapidana benar-benar mendapatkan peningkatan keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah kembali ke masyarakat.

Gambar 2. Kegiatan Pembinaan Membuat Batik

Tak hanya bertani pada gambar di atas juga terdapat kegiatan membuat batik yang masih dilakukan narapidana. Dimana mereka secara mandiri dapat mencoba mencanting bahkan menentukan pola sendiri. Hal tersebut sebelumnya sudah diajarkan keterampilan praktis dalam membuat batik. Keterampilan membuat batik relevan dan dapat menjadi bekal untuk mereka setelah bebas nanti, baik untuk berwirausaha di sektor pertanian atau mencari pekerjaan terkait. Dengan membuka akses ini secara merata, Lapas memastikan bahwa semua narapidana memiliki peluang yang sama untuk memperoleh keterampilan yang meningkatkan kemandirian mereka.

Selain pelatihan keterampilan, Lapas juga memberikan perhatian besar pada penyuluhan. Berbagai topik penyuluhan diselenggarakan, yang bisa mencakup penyuluhan hukum, kesehatan, agama, motivasi, atau bahkan persiapan kembali ke masyarakat.

Gambar 3. Penyuluhan tentang Keagamaan

Dari gambar di atas adalah hanya satu contoh kegiatan penyuluhan. Sebenarnya tak hanya penyuluhan dalam bidang keagamaan tetapi juga hafalan surat dalam Al-Quran bersama. Pada saat observasi terlihat penyuluhan serta hafalan bersama ini disampaikan di masjid dan narapidana menyimak dengan baik. Bahkan untuk memastikan semua narapidana mendapatkan informasi yang sama dan kesempatan untuk mengikuti sesi ini, Lapas menerapkan mekanisme yang transparan. Pak Rudianto, seorang narapidana, secara pribadi merasa program pembinaan sangat baik, bahkan ia telah berhasil menghafal sebagian Al-Qur'an dan melihat kegiatan pembinaan semakin berkembang.

Jadwal dan lokasi penyuluhan dipasang di papan informasi yang mudah diakses di area umum Lapas. Ini memungkinkan narapidana untuk mengetahui kapan dan di mana sesi penyuluhan akan diadakan, sehingga mereka bisa merencanakan untuk hadir. Tidak ada batasan atau diskriminasi berdasarkan latar belakang, memastikan setiap narapidana memiliki akses setara terhadap informasi dan edukasi yang disalurkan melalui penyuluhan ini. Secara keseluruhan, detail-detail kegiatan ini menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Madiun tidak hanya memiliki kebijakan kesetaraan akses, tetapi juga melaksanakannya secara konkret melalui penyediaan sumber daya, instruktur, material, serta mekanisme informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh seluruh narapidana.

Selanjutnya, Kepala Seksi Bimbingan Pemasarakatan menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pembagian hak dan program pembinaan di Lapas Kelas I Madiun berlandaskan pada peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Pemasarakatan. hak-hak narapidana hanya dapat diberikan apabila mereka telah memenuhi tiga kriteria utama, salah satunya adalah partisipasi aktif dan baik dalam program pembinaan. Hal ini berarti bahwa akses terhadap hak dan program pembinaan berjalan secara beriringan dan saling mendukung; narapidana yang disiplin mengikuti pembinaan akan mendapatkan haknya, sementara yang tidak mengikuti dapat dikenakan hukuman disiplin. Pandangan ini didukung oleh Staf Kegiatan Kerja yang menyebutkan bahwa pembinaan kemandirian dalam mencari kerja dilakukan berkoordinasi dengan bidang Bimpas, berdasarkan minat, bakat, dan syarat tertentu seperti telah menjalani setengah masa pidana.

Lebih lanjut, Staf Bimbingan Pemasarakatan memberikan perspektif terkait kesetaraan akses terhadap program pendidikan. Beliau menjelaskan bahwa di Lapas Kelas I Madiun, latar belakang sosial atau status narapidana, baik itu pejabat maupun rakyat jelata, tidak memengaruhi kesempatan mereka untuk mengikuti program pendidikan. Semua narapidana disamaratakan dalam hal akses pendidikan, mulai dari program kejar paket (kesetaraan SD) hingga program sarjana S1 yang bekerja sama dengan Universitas Terbuka dan Dinas Pendidikan. komitmen Lapas untuk mengurangi kesenjangan berdasarkan importasi status sosial dari luar, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua narapidana untuk mengembangkan diri secara akademis. Dari sisi narapidana, persepsi terhadap keadilan ini juga terlihat positif.

Adapun kesempatan untuk mengikuti program pembinaan terbuka untuk umum, khususnya bagi napi yang benar-benar berminat. Hal ini menguatkan

bahwa prinsip *equity* dalam akses pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas I Madiun telah dirasakan dan diterima secara positif oleh narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lapas Kelas I Madiun telah menerapkan prinsip keadilan secara sistematis melalui asesmen individual terhadap setiap narapidana. Lebih lanjut, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Bimbingan Kerja, distribusi hak-hak pembinaan juga didasarkan pada parameter objektif seperti kepatuhan narapidana terhadap program pembinaan dan penurunan tingkat risiko. Lapas Kelas I Madiun juga menjamin kesetaraan dalam akses pendidikan formal, tanpa diskriminasi latar belakang sosial. Respons positif dari narapidana, menunjukkan bahwa implementasi asesmen *equity* ini dirasakan secara nyata oleh warga binaan.

Self Assessment

Di Lapas Kelas I Madiun, dimensi *Self-Assessment* dalam pembinaan narapidana terwujud secara kuat melalui partisipasi aktif dalam program-program keagamaan. Observasi menunjukkan bahwa Lapas telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi narapidana untuk melakukan refleksi diri dan transformasi personal melalui kegiatan-kegiatan spiritual. Salah satu kegiatan untuk membantu narapidana dalam menilai diri sendiri yaitu program mengaji bersama. Program mengaji bersama menjadi salah satu wadah utama bagi narapidana untuk melakukan *self-assessment*. Dalam kegiatan ini, narapidana tidak hanya sekedar mengikuti pelajaran, tetapi juga menunjukkan tingkat fokus yang tinggi dan partisipasi aktif.

Gambar 4. Pengajian Lapas

Dari gambar tersebut menjadi bukti bahwa narapidana juga bisa mendengar dan mengikuti pengajian. Penulis mengamati bahwa beberapa

narapidana bahkan mengajukan pertanyaan reflektif tentang makna ajaran yang disampaikan. Selain itu, narapidana tampak serius mendengarkan ceramah. Bagian paling signifikan dari pengamatan ini adalah ekspresi beberapa narapidana yang terlihat merenung. Ini mengindikasikan bahwa mereka tidak hanya menyerap informasi, tetapi juga secara aktif memprosesnya, merenungkan relevansinya dengan kehidupan mereka, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai moral dan spiritual. Proses ini adalah bentuk *self-assessment* awal, di mana mereka mulai mengkaji kembali keyakinan dan perilaku mereka di masa lalu.

Fokus pada pengembangan keterampilan ini secara langsung bertujuan untuk memberikan narapidana rasa kompetensi dan nilai diri, yang esensial dalam menghadapi stigma dan meningkatkan *self-assessment* mereka. Selain pengembangan keterampilan, Lapas Kelas I Madiun juga memberikan perhatian pada aspek mental dan spiritual narapidana untuk membangun kembali harga diri dan mengatasi perasaan terisolasi. Petugas aktif mendatangi narapidana di lokasi pembinaan atau kamar mereka untuk mendengarkan keluhan, kendala, dan masukan. Pendekatan informal ini terbukti lebih efektif dalam mendorong narapidana untuk terbuka, terutama di lingkungan yang lebih kecil seperti kamar, dibandingkan forum besar. Program Yasinan Keliling di setiap kamar, yang melibatkan narapidana pondok pesantren sebagai pemimpin, juga menjadi sarana untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengikis perasaan sendiri atau ditolak, sekaligus membangun spiritualitas. Komitmen Lapas dalam meningkatkan *self-assessment* narapidana juga tercermin dari penempatan khusus warga binaan.

Dimensi *self-assessment* dalam teori deprivasi menyoroti dampak psikologis penahanan, di mana narapidana dapat mengalami perasaan ditolak atau tidak berharga akibat stigma kriminal dan isolasi sosial. Upaya ini diawali dengan identifikasi minat dan bakat narapidana. Selain pengembangan keterampilan, Lapas juga memberikan perhatian pada aspek mental dan spiritual. Meskipun program konseling formal telah diganti dengan pendekatan *counseling* keliling atau percakapan non-formal, metode ini terbukti lebih efektif. Pendekatan importasi mengemukakan bahwa karakteristik dan pengalaman dari luar lingkungan Lapas dapat memengaruhi perilaku dan adaptasi narapidana di dalam Lapas. Narapidana pondok pesantren, bahkan berharap program pesantren di Lapas dapat diperluas.

Prisonization

Di Lapas Kelas I Madiun, fenomena *Prisonization* terlihat jelas melalui implementasi dua kegiatan rutin yang menjadi bagian integral dari sistem kontrol dan pembinaan narapidana yaitu pengeledahan sidak rutin dan penyuluhan tata tertib. Kedua kegiatan ini secara signifikan membentuk dan memperkuat adaptasi narapidana terhadap norma dan budaya yang berlaku di lingkungan LAPAS. Berikut adalah bukti bahwa kegiatan tersebut dilakukan.

Gambar 5. Pengeledahan Sidak Rutin

Penelitian ini melibatkan observasi bagaimana dampak dari program yang sudah ada salah satunya adalah pengeledahan rutin, meskipun penelitian ini tidak melibatkan narapidana secara partisipatif. Pengeledahan sidak rutin adalah contoh dari pendekatan deprivasi. Narapidana "dideprivasi" dari privasi dan potensi barang terlarang. Ritual pengeledahan yang berulang ini bertujuan untuk menginternalisasi norma keamanan, membuat narapidana menyesuaikan diri dengan aturan dan batasan yang diberlakukan oleh lembaga pasyarakatan. Hal tersebut bentuk kontrol kelembagaan yang mengurangi kebebasan individu dan mendorong kepatuhan. Kepatuhan yang terbiasa ini mencerminkan adaptasi mereka terhadap lingkungan yang sangat terkontrol, di mana privasi pribadi sering kali dikorbankan demi keamanan kolektif, sebuah ciri khas dari proses *prisonization*.

Selain kegiatan penggeladahan, ada pula penyuluhan tata tertib berperan sentral dalam membentuk kepatuhan dan transmisi budaya penjara. Penyuluhan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai penekanan berulang-ulang tentang aturan yang berlaku. Hal tersebut tercermin pada gambar berikut ini:

Gambar 6. Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan

Rutinitas penyampaian pada gambar di atas menjadi contoh dalam memperkuat pemahaman dan penghayatan narapidana terhadap lingkungan Lapas. Menariknya, observasi menunjukkan perbedaan respons antara narapidana baru dan lama. Narapidana baru cenderung lebih banyak bertanya dan mencoba memahami, menunjukkan fase awal adaptasi mereka. Sementara itu, narapidana lama menunjukkan pemahaman yang mendalam dan seringkali berfungsi sebagai "mentor" bagi narapidana baru dalam mengenal Lapas. Fenomena ini mempercepat proses adaptasi dan memastikan bahwa aturan serta ekspektasi perilaku terus-menerus diperkuat dalam komunitas narapidana.

Prisonisasi, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Clemmer dan dikutip oleh Sugeng Pujileksono (2017), merujuk pada proses di mana individu mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari, moral, dan adaptasi sebagai dampak dari berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kegiatan Kerja, diakui bahwa pengaruh prisonisasi memang ada, terutama karena narapidana terpisah dari keluarga dan lingkungan sosialnya.

Hal tersebut juga disampaikan bahwa untuk mengatasi hal ini, Lapas Kelas I Madiun melakukan pendekatan proaktif. Narapidana dipanggil dan diajak berdiskusi tentang minat dan keahlian mereka, bertujuan untuk mengikis kebiasaan negatif seperti malas dan mengembangkan potensi yang lebih positif.

Meskipun demikian, tantangan prisonisasi masih tetap ada. Staf Bimbingan Kerja mengidentifikasi beberapa kebiasaan negatif yang sering terjadi di antara warga binaan seperti kemalasan dan "celometan" (banyak bicara tanpa substansi atau mencari perhatian), bahkan hingga menghindari program pembinaan. Untuk mengatasi ini, Lapas menerapkan sistem *reward* dan *punishment*. Narapidana yang disiplin dan rajin mengikuti program, misalnya datang apel paling awal, akan mendapatkan *reward* berupa alat tulis. Sebaliknya, bagi narapidana yang malas atau tidak mengikuti program, peringatan akan diberikan. Jika perilaku tersebut berulang, mereka dapat dikenakan hukuman disiplin hingga dipindahkan ke registrasi F, sebuah indikasi bahwa Lapas berupaya keras untuk melawan kebiasaan negatif yang mungkin berkembang akibat *prisonisasi*. Staf Kegiatan Kerja juga menambahkan bahwa mereka selalu memperingatkan narapidana yang terlihat "lemot" akibat efek narkoba, dan berusaha mendisiplinkan mereka melalui apel pagi untuk melakukan perubahan.

Pengakuan adanya prisonisasi di Lapas Kelas I Madiun sangat relevan dengan teori deprivasi, yang menyatakan bahwa adaptasi narapidana adalah respons terhadap kehilangan kebebasan dan fasilitas dari dunia luar. Keterpisahan narapidana dari keluarga dan lingkungan sosial memang menciptakan pengaruh signifikan. Adanya "budaya malas" yang dibawa dari luar oleh narapidana narkoba, yang kemudian menjadi kebiasaan di dalam Lapas. Ini menunjukkan bahwa meskipun deprivasi menciptakan kondisi baru, karakteristik yang dibawa dari luar (importasi) juga berinteraksi dengan lingkungan Lapas. Lapas Kelas I Madiun secara proaktif mengatasi "budaya malas" ini melalui pendekatan yang berfokus pada deprivasi terhadap kebiasaan negatif dan penanaman disiplin baru. Apel pagi dijadikan rutinitas wajib untuk mengubah mentalitas dan perilaku,

mencerminkan pemahaman bahwa "kehidupan di luar kan beda sama di dalam, di dalam ada aturan di luar kan tidak ada."

Kebudayaan dalam Lapas

Dimensi kebudayaan dalam Lapas Kelas I Madiun terwujud melalui serangkaian aktivitas pembinaan yang secara aktif membentuk budaya khas Lapas. Lapas bukan sekadar tempat hukuman, melainkan ruang sosial kompleks tempat subkultur berkembang, dipengaruhi latar belakang narapidana dan interaksi dengan petugas. Observasi menunjukkan, Lapas Kelas I Madiun secara sadar membangun kebiasaan dan nilai-nilai positif untuk mengikis budaya negatif yang mungkin terbawa dari luar atau terbentuk di dalam. Salah satu pilar utama pembentukan budaya di Lapas adalah acara rutin keagamaan seperti sholat berjamaah dan pengajian. Partisipasi aktif dalam ibadah mengindikasikan bahwa nilai spiritual memiliki peranan penting, menciptakan atmosfer kebersamaan, saling mendukung, dan membantu narapidana menemukan ketenangan batin serta tujuan hidup di tengah keterbatasan. Kebiasaan ini membentuk pola interaksi harmonis dan menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan etika dan perilaku kolektif.

Gambar 7. Acara Rutin Sholat dan Mendengarkan Ceramah

Pada gambar di atas menjadi contoh adanya ceramah setelah kegiatan sholat berjamaah. Selain itu, observasi menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi ritual yang secara signifikan mengikat komunitas narapidana. Partisipasi aktif narapidana dalam ibadah dan pengajian mengindikasikan bahwa nilai spiritual memiliki peranan penting dalam kehidupan mereka di dalam Lapas. Aktivitas ini menciptakan atmosfer kebersamaan, saling mendukung dalam aspek moral dan keagamaan, serta membantu narapidana menemukan ketenangan batin dan tujuan hidup di tengah keterbatasan. Kebiasaan

ini membentuk pola interaksi yang harmonis dan menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan menjadi landasan bagi etika dan perilaku kolektif di Lapas.

Kegiatan keagamaan tersebut juga menjadi salah satu kegiatan yang sudah menjadi budaya dalam lapas. Selaku Kepala Seksi Kegiatan Kerja juga tentunya memiliki cara yang dilakukan untuk membentuk budaya di Lapas. Secara khusus narasumber menyatakan solusi penghambat budaya tidak baik dengan cara pendekatan disipliner diterapkan melalui kegiatan apel pagi, asesmen, pengenalan lingkungan, hingga pemberian pelatihan keterampilan sebagai bentuk reintegrasi sosial. Selain pendekatan fisik, pendekatan spiritual seperti kegiatan Yasinan dan doa bersama juga dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan membentuk kesadaran diri narapidana.

Selain pada aspek keagamaan, terlihat juga pada aspek kebudayaan lainnya yang menonjol adalah inisiatif bakti sosial kepada keluarga narapidana, yang diinisiasi oleh pihak Lapas dengan partisipasi aktif dari narapidana itu sendiri. Kegiatan ini melampaui batasan fisik penjara, menciptakan jembatan kepedulian antara komunitas Lapas dan dunia luar.

Gambar 8. Bakti Sosial Rutin setiap Acara Besar Kepada Keluarga Narapidana

Adanya bakti sosial seperti gambar di atas menunjukkan bahwa kebudayaan di Lapas Madiun tidak hanya tentang adaptasi terhadap lingkungan terbatas, tetapi juga tentang pengembangan nilai-nilai positif seperti empati, kepedulian, dan solidaritas. Keterlibatan narapidana dalam kegiatan ini menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan kebersamaan, memperlihatkan bahwa mereka tetap memiliki koneksi emosional dan sosial dengan keluarga serta masyarakat di luar, yang pada gilirannya dapat mendukung proses reintegrasi mereka. Hasil wawancara dengan berbagai narasumber menunjukkan bahwa dimensi budaya sangat berperan dalam menentukan keberhasilan proses pembinaan. Kasi Giatja menjelaskan bahwa budaya malas dan ketergantungan terhadap narkoba merupakan tantangan utama. Budaya tersebut, jika tidak diarahkan secara disiplin dan sistematis, dapat menjadi hambatan besar bagi keberhasilan program pembinaan.

Menyoroti "budaya malas" dan ketergantungan narkoba sebagai tantangan utama. Beliau menegaskan bahwa budaya-budaya negatif ini, jika tidak diatasi secara disiplin dan sistematis, akan menghambat program pembinaan. Untuk menghadapi hal ini, Lapas menerapkan pendekatan disipliner melalui apel pagi, asesmen, pengenalan lingkungan dan pelatihan keterampilan sebagai upaya reintegrasi sosial. Selain itu, pendekatan spiritual seperti kegiatan Yasinan dan doa bersama juga diperkenalkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan membentuk kesadaran diri narapidana, sehingga mampu mengimpor nilai-nilai positif ke dalam budaya Lapas. Oleh karena itu, penempatan narapidana dalam kamar atau blok setelah proses Mapenaling sangat mempertimbangkan kesiapan mereka untuk mengikuti program pembinaan yang sesuai, menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku dan pembentukan budaya baru.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan deprivasi dan importasi dalam pembinaan narapidana di Lapas Kelas I Madiun terbukti efektif membentuk lingkungan kondusif bagi rehabilitasi melalui integrasi kebijakan yang menjamin keadilan, peningkatan harga diri, mitigasi prisonisasi, serta pemanfaatan latar belakang narapidana secara konstruktif. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan krusial, seperti birokrasi yang panjang, keterbatasan fasilitas, dampak Register F yang memangkas hak narapidana, kendala administrasi dokumen pendidikan, hingga hambatan internal berupa budaya negatif narapidana. Kondisi ini menuntut Lapas untuk terus berinovasi dalam menyeimbangkan aspek keamanan dan tujuan rehabilitasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4324/9780429469237-3>
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Buku data statistik pemasyarakatan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.
- Fitria, B. M. (2023). Strategi pembinaan narapidana residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 103–115. <http://repositori.unimma.ac.id/3908>
- Irwin, J., & Cressey, D. R. (1962). Thieves, convicts and the inmate culture. *Social Problems*, 10(2), 142–155. <https://doi.org/10.2307/799047>
- Karnovinanda, R., Suciati, T., Studi, P., Dokter, P., Kedokteran, F., Sriwijaya, U., Moh, J., & Komplek, A. (2014). Prevalensi depresi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Jurnal Kedokteran Sriwijaya*, 4, 243–249.
- Krisna, A. B. (2023). Pengaruh antara tingkat ketegangan sosial dengan tingkat risiko WBP melakukan perilaku kekerasan di Rutan Kelas IIB Purworejo. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(1), 255–268. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i1.1731>

-
- Mazher, S., & Arai, T. (2025). Behind bars: A trauma-informed examination of mental health through importation and deprivation models in prisons. *European Journal of Trauma and Dissociation*, 9(1), 100516. <https://doi.org/10.1016/j.ejtd.2025.100516>
- Mulia, H. (2020). *Simalakama pemsyarakatan: Proses hukum berujung kematian*. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 177–182.
- Noor, Z. Z. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif*. Deepublish.
- Sugeng, P. (2017). *Sosiologi penjara*. Universitas Brawijaya Press.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Ward, T., & Maruna, S. (2007). *Rehabilitation: Beyond the risk paradigm*. Routledge.
- Waskito, A. M. (2024). *Paradigma baru pemsyarakatan: Sejarah dan filosofi pemsyarakatan*. Kencana.
- Waskito, A. M., Hunafa, A. F. R., Sutrisno, A. E., Mamesah, H., Risyat, I. A., Dzaky, L. F., Yulianto, R. F., & Saefudin, W. (2020). Inovasi pembinaan berbasis humanis di lembaga pemsyarakatan. *GEEJ: Journal of English Education and Humanities*, 7(2), 45–60.
- Zhao, Y., Messner, S. F., & Liu, J. (2020). The influence of importation and deprivation factors on prison adaptation: Insights from Chinese prisons. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 63, 100425. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2020.100425>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Pemsyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsyarakatan.